

ABSTRAK

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi salah satu sarana untuk pengembangan dan pembinaan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan. Organisasi karang taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Desa Mejayan dipilih menjadi lokasi penelitian karena karang taruna di Desa Mejayan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan pengesahan organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa mejayan dalam pengesahan organisasi karang taruna.

Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Dari data primer yang diperoleh melalui wawancaranya dan angket dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat desa mejayan sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan sumber buku, jurnal dan undang-undang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta peristiwa yang saat ini terjadi, guna memahami implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Mejayan menghadapi kendala seperti Lemahnya sistem Regulasi dan Struktur Kelembagaan dalam Pengesahan, kurangnya sosialisasi tentang peraturan tentang karang taruna kepada masyarakat desa, Budaya Birokrasi dan pola pikir Lembaga yang kurang Progresif, adanya perubahan kebijakan karena pergantian kepala desa. Penulis menyarankan agar pemerintah Desa Mejayan Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna. Selain itu, pemerintah Desa Mejayan perlu melakukan perbaikan menyeluruh mulai dari aspek koordinasi hingga menyediakan fasilitas yang memadahi. Masyarakat desa Mejayan juga harus berpartisipasi dan ikut mendukung adanya organisasi karang taruna agar berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Implementasi – Karang taruna – Kebijakan

ABSTRACT

Karang Taruna is a social community organization that serves as a means for the development and empowerment of youth to achieve social welfare. The organization is regulated under the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 25 of 2019. Mejayan Village was chosen as the research location because the Karang Taruna in this village faces several obstacles in its implementation and formal establishment. This study aims to identify and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna, as well as to determine the factors that hinder the village government of Mejayan in the formal establishment of the Karang Taruna organization.

This research is empirical in nature, using a case study and statutory approach. Primary data were obtained through interviews and questionnaires involving various parties, ranging from the village government to the community members of Mejayan Village. Meanwhile, secondary data were collected through literature studies from sources such as books, journals, and laws and regulations. The data analysis in this study was conducted descriptively, referring to legal norms contained in statutory regulations as well as current events, in order to understand the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna.

The implementation of Minister of Social Affairs Regulation No. 25 of 2019 concerning Karang Taruna in Mejayan Village faces several challenges, including the weak regulatory system and institutional structure for legalization, lack of socialization regarding the regulation to the village community, bureaucratic culture and institutional mindsets that are still conservative and non-progressive, as well as policy inconsistencies caused by changes in village leadership. The author suggests that the government of Mejayan Village should enhance its understanding of the Minister of Social Affairs Regulation No. 25 of 2019 concerning Karang Taruna. In addition, the village government must undertake comprehensive improvements, ranging from strengthening coordination mechanisms to providing adequate facilities. The Mejayan Village community must also participate actively and support the existence of Karang Taruna so that the organization can function properly and contribute effectively to community development.

Key Words : *Implementation – Karang Taruna – Policy*